

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

Untuk bisa meneliti tentang implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024 dibutuhkan teori-teori yang sesuai dengan judul penelitian untuk bisa membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait dengan implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Jepara dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024.

#### 1. Teori Implementasi

Implementasi secara etimologis, berasal dari bahasa Inggris “*implementation*”, yang dari awal mula kata kerja kerja “*to implementation*”. Menurut Webster’s Dictionary (dalam Tachan, 2008) yang dikutip oleh Dr. Kridawati Sadhana, M.S., kata *to imolement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” yang awalnya kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implore*” maksudnya adalah “*to fill up*”, “*to fill in*”, yang memiliki arti mengisi penuh; melengkapi. Kemudian kata “*plere*” yaitu “*to fill*”, artinya mengisi. Sehingga kata *to implement* (mengimplementasikan) yang artinya *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give pratical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jadi secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil<sup>1</sup>.

Studi implementasi merupakan kajian riset kebijakan yang mengarah pada proses implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, seringkali secara politis diintervensi oleh berbagai kepentingan<sup>2</sup>.

Dari pengertian implementasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa impementasi merupakan pelaksanaan yang memiliki kaitan dengan menyelesaikan kegiatan melalui kebijakan yang mengarah pada kegiatan tertentu.

---

<sup>1</sup> Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press)*, Cetakan I:, vol. 13 (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2011), 173.

<sup>2</sup> Siti Widharetno Mursalim, “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 130, <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>.

## 2. Teori Pendidikan Politik

Menurut Iyep Candra Hermawan (2020), pendidikan politik disebut *political socialization* dan *political education* dalam bahasa Inggris. Istilah *political socialization* jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah arti dari sosialisasi politik. Dalam dunia akademis, para ahli sering menyamakan pendidikan politik dan sosialisasi politik karena keduanya memiliki arti yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Pendidikan politik sering disebut sebagai *political forming* atau *politische bildung*. Alasan mengapa disebut “forming” karena termasuk niat untuk menciptakan tokoh politik yang mengetahui status politiknya. Disebut “bildung” (bentuk atau pendidikan diri) karena kata tersebut berarti membentuk diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri, menjadi tokoh politik<sup>3</sup>.

Menurut Muchlisin Riadi (2020), pendidikan politik adalah usaha atau upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik berupa pengajaran atau pembinaan secara sadar dan sistematis agar mereka dapat mencintai dan melekat erat pada bangsa dan negara serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik sehingga bahwa mereka dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab atas realisasi tujuan politik<sup>4</sup>. Dari penjelasan di atas, pendidikan politik adalah upaya yang arahnya ke proses Pendidikan politik yang penataan sistem politik yang baik. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang ideal adalah demokrasi Pancasila<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, kesadaran politik merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kesadaran politik adalah keadaan pikiran yang menanggapi hal-hal tertentu di negara ini.

Pendidikan politik merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan dan sistematis yang mengarahkan individu ke dalam proses pembelajaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Iyep Candra Hermawan, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2020.

<sup>4</sup> Muchlisin Riadi, “Pendidikan Politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk Dan Hambatan),” [kajianpustaka.com](https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html#:~:text=Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan,berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik.), 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html#:~:text=Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan,berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik.>

<sup>5</sup> Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik,” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 5, no. 1 (2017): 57.

politik. Pendidikan politik adalah upaya sengaja untuk mempengaruhi individu menjadi lebih aktif dalam perjuangan politik dan memikul tanggung jawab moral yang tinggi dalam kegiatan politik mereka<sup>6</sup>.

Menurut Eko Handoyo dan Puji Lestari (2017) yang dikutip Asmika Rahman dan Suharno, tujuan diselenggarakannya pendidikan politik adalah untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, sehingga memiliki kesadaran politik, kreativitas politik, dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pembangunan politik. Diharapkan melalui pendidikan politik semacam ini, akan ditumbuhkan tokoh-tokoh politik yang bertanggung jawab terhadap negara-bangsa<sup>7</sup>.

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'ood (1986) yang dikutip Asmika Rahman, pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik, khususnya membentuk nilai-nilai politik dan menunjukkan bagaimana seharusnya setiap masyarakat berpartisipasi dalam lembaga politiknya.

Mohammad Nuh dalam Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada mendidik seseorang tentang peran seseorang dalam partisipasi dalam pemerintahan, partai politik, dan birokrasi. Namun pada hakekatnya merupakan perkembangan dari suatu proses pendewasaan dan pendidikan seseorang tentang tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negara sesuai dengan kewenangannya, yang berarti mentalitas dan moralitas dalam politik<sup>8</sup>.

Giesecke, seorang pakar pendidikan, pendidik dan negarawan Jerman, mendefinisikan pendidikan politik dengan beberapa definisi, antara lain: *Pertama*, *Bildungswissen*, merupakan kemampuan memahami bentuk dan gambaran manusia (*mensbeeld*) dan identitasnya, memiliki rasa percaya diri yang kuat, kemampuan menghilangkan perasaan rendah diri dan ketergantungan pada kekuatan atau bangsa lainnya, pemahaman yang benar tentang kekuatan bangsa itu sendiri, pandangan hidup

---

<sup>6</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

<sup>7</sup> Asmika Rahman and Suharno, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 286.

<sup>8</sup> Asmika Rahman, "Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8385>.

bangsa dan falsafah hidup (dalam hal ini Pancasila) digunakan untuk mencapai tujuan hidup bangsa standar perjuangan adalah untuk hidup kehidupan yang baik.

*Kedua, Orientierungswissen*, merupakan kemampuan berorientasi pada pemahaman manusia yang membawa kebahagiaan, Keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif, seseorang harus berani melihat realitas secara jernih, dan bersedia mereposisi situasi politik yang tidak stabil. Terutama mengoreksi noda dan elemen perusak lainnya. Untuk mencari alternatif pemecahan yang baik, manusia dapat keluar dari berbagai kebuntuan/kebuntuan dan bergerak menuju keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan Bersama.

*Ketiga, Verhaltungswissen*, artinya tingkah laku, yaitu pemahaman tentang hukum, norma, peraturan yang berlaku untuk memandu semua perilaku dan peraturan politik. Jadi tema menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menghadapi situasi politik saat ini.

*Keempat, Aktionwissen* memiliki arti mampu bertindak secara baik, cermat, dan benar karena didukung oleh prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan disertai dengan refleksi objektif dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mencakup kemampuan yang disengaja untuk merenungkan peristiwa politik untuk menghasilkan wawasan reflektif dan menghasilkan gagasan dan tindakan/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan<sup>9</sup>.

Sherman dan Kolker dalam (Affandi, 2012: 31) berpendapat bahwa: “Pendidikan politik selalu dikaitkan dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari suatu budaya dan menjadi bagian dari budaya itu, menjadi bagian penting dari konsep diri mereka. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang bersifat fundamental dari seseorang”<sup>10</sup>.

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, penulis memiliki kesimpulan pendidikan politik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam sosialisasi politik untuk pengajaran terhadap individu lain agar berpartisipasi di dunia politik.

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>10</sup> Idrus Affandi, *Pendidikan Politik* (Bandung: Mutiara Press, 2012), 31.

Dasar utama pendidikan politik adalah Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pancasila dijadikan sebagai dasar utama pelaksanaan pendidikan politik karena Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, dan dasar negara Indonesia, memberikan identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus menggali jati diri ini agar dapat mengenali dengan baik karakter, potensi kekuatan dan kelemahan diri sendiri, sehingga mampu mengatasi permasalahan dan tantangan global dalam kehidupan<sup>11</sup>.

Pengetahuan politik akan membuat orang berpartisipasi sampai batas tertentu, dan pengetahuan politik yang berkualitas akan membuat orang lebih aktif di bidang politik, begitu pula sebaliknya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk dikembangkan bersama-sama. Ketiga hal tersebut dianggap sebagai jiwa dari literasi kewarganegaraan dan politik.

Kinerja literasi politik merupakan hasil pendidikan politik dari tiga aspek. Dari segi pengetahuan, seseorang dapat dikatakan melek politik jika telah menguasai sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana lembaga bekerja.
2. Bagaimana berpartisipasi aktif dalam menggunakan pengetahuan.
3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana suatu masalah akan diputuskan.
4. Kemampuan memiliki gagasan yang baik tentang tujuan kebijakan yang dapat dicapai jika masalah (*problem*) diselesaikan.
5. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan memperbaiki tindakan mereka sendiri.

Aspek-aspek yang membentuk literasi politik setidaknya berkaitan dengan sikap terhadap kebebasan, toleransi, keadilan, menghargai kebenaran, menghargai gagasan, dan lain-lain yang sering disebut sebagai nilai-nilai prosedural. Sementara itu, dari segi keterampilan, seseorang tidak hanya harus menjadi pengamat yang baik, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif atau bahkan aktif menolak, yang bisa disebut literasi politik. Orang yang melek politik juga toleran terhadap pandangan orang lain, mampu memikirkan perubahan dan bagaimana melakukannya

---

<sup>11</sup> Eko Handoyo and Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, *Visipena Journal*, vol. 7 (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 13.

dengan benar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan politik sangat penting artinya dalam membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan partisipasi warga negara.

Saat ini, pelaksanaan pendidikan politik di kalangan masyarakat seringkali tidak efektif, atau bahkan kurang memuaskan, karena masih sedikitnya peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pendidikan politik. Hanya ada satu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan politik yaitu Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu fungsi partai politik, sedangkan negara dalam hal ini pemerintah tidak ikut serta dalam pendidikan politik. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Politik, yang menjelaskan bahwa Negara hanya menggalakkan program pendidikan politik yang dilakukan oleh agen politik. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan politik yang dilakukan agen politik kepada masyarakat.

Fungsi pendidikan politik yang diharapkan dalam arti luas adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa. Dengan kata lain, pendidikan melibatkan penundaan manusiawi. Tindakan yang ditujukan untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku manusia menuju kedewasaan.
- b. Pendidikan politik sebagai pengembangan kesadaran politik.
- c. Pendidikan politik sebagai pembentukan kader partai.
- d. Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi bangsa. Ideologi dalam istilah politik, atau ideologi politik, adalah ekspresi keyakinan atau rencana yang dipegang oleh suatu negara, bangsa, partai politik, atau kelompok politik lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik tertentu<sup>12</sup>.

### 3. Pengawasan Partisipatif di Pemilu

Menurut definisi Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir yang dikutip Nurkinan, pengawasan adalah segala upaya dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana tugas dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, pengertian supervisi adalah mengamati kinerja semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua

---

<sup>12</sup> Edwin Nurdiansyah, "Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2015): 55–56.

pekerjaan yang sedang dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Djamaluddin Tanjung dan Supardan memperkenalkan konsep pengawasan, salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana<sup>13</sup>.

Berdasarkan pengertian regulasi ini, terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Proses regulasi pada akhirnya dapat menentukan tingkat pelanggaran, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penipuan, dan hambatan lainnya di masa mendatang. Jadi pengawasan secara menyeluruh merupakan kegiatan membandingkan antara apa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu ditentukan indikator, norma, standar dan ukuran dari tujuan yang ingin dicapai.

Pemilu merupakan perwujudan dari proses demokrasi. Pemilu yang baik, yang dilaksanakan menurut asas limpahan dan keadilan, akan menghasilkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat<sup>14</sup>. Menurut Ramlan (1992) yang dikutip Rachmad Budianto, pemilu diartikan sebagai mekanisme untuk memilih dan mendelegasikan atau melepaskan kedaulatan kepada orang atau pihak yang dipercaya. Ali Moertopo mendefinisikan pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya pemilu adalah sarana rakyat menjalankan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945<sup>15</sup>.”

Pemilihan itu sendiri pada dasarnya adalah demokrasi, memilih anggota Kongres Rakyat, Republik Rakyat Demokratik, Partai Demokrat, yang tugasnya bekerja sama dengan pemerintah

---

<sup>13</sup> Nurkinan, “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019” 3, no. 1 (2018): 34.

<sup>14</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 619–620, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>.

<sup>15</sup> Rachmad Budianto, “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda,” *EJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 98.

untuk memutuskan politik dan mengelola pemerintahan negara. Tujuan akhirnya tentu pemerintahan yang baik, adil dan makmur.

Pemilu yang berkualitas, pemilu yang menjamin persaingan yang sehat, pemilu dengan partisipasi publik, pemilu yang sangat representatif, dan pemilu yang pada akhirnya dapat ditempati adalah salah satu tugas reformasi 1998. Itu hanya undangan, tapi juga perlu diawasi, dan diimplementasikan.

Pengawasan partisipatif adalah kegiatan sukarela individu atau lembaga untuk menjamin pemilu yang demokratis.

Pengawasan partisipatif merupakan sesuatu yang tidak dicapai dengan mendorong demokrasi di era orde baru yang serba otoriter dan sentralistis, karena kontrol kekuasaan terlalu kuat saat itu, dan masyarakat sipil tidak terlibat dalam konsolidasi demokrasi. Berakar di pedesaan, pendukung utamanya adalah kekuatan birokrasi, juga kekuatan militer. Oleh karena itu, di era reformasi saat ini, diharapkan agar setiap orang memiliki pemikiran yang lebih terbuka tentang pengawasan partisipatif pemilu, dan menciptakan pemilu yang berprinsip langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Yesaya Tiluata yang dikutip oleh Muhammad Tajuddin Ulya & Muhammad Chairul Huda, pengawasan partisipatif adalah bagaimana Bawaslu melibatkan masyarakat luas atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkenalkan nilai pemantauan itu sendiri, dimana diharapkan masyarakat atau pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait dengan kelompok sosial di bidangnya masing-masing menghargai, baik dalam hal ketidakpatuhan maupun pencegahan, semua disosialisasikan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pemantauan pemilu atau seluruh tahapan proses pemilukada<sup>16</sup>.

Menurut Ramlan Subakti & Hari Fitriyanto, pengawasan partisipatif merupakan strategi yang ditempuh Bawaslu untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah pengawasan yang luas. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi prosedur tahapan

---

<sup>16</sup> Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Prespektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam XIV*, no. 1 (2019): 117.

pemilu atau pilkada, dan memantau setiap tahapan yang sedang berlangsung<sup>17</sup>.

Adanya hubungan pengawasan dengan masyarakat telah melahirkan pengawasan partisipatif, Pasal 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu) 448 ayat (2), bentuk partisipasi masyarakat merupakan bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik pemilih, tentang survei pemilu atau jajak pendapat dan *quick count* pemilu. Partisipasi pada butir b ayat (3) berikutnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat secara keseluruhan<sup>18</sup>.

Menurut Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia, Dasar utama kenapa harus ada pengawasan partisipatif ada 3 (tiga) alasan, antara lain: Secara subyektif karena kapasitas dan kapasitas lembaga pemantau pemilu yang terbatas, secara obyektif karena wilayah yang luas, pemilu yang kompleks, dan pelanggaran yang semakin beragam, dan secara kualitatif, untuk menjamin kelancaran proses pemilu dan mendorong pemilu yang substantif. Pemilihan<sup>19</sup>.

Aspek terpenting dari pemantauan partisipatif ditemukan dalam UU No.1. Pasal 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 448 (3) menjelaskan 4 hal terpenting antara lain:

1. Tidak memihak atau merugikan kepentingan calon.
2. Non-intervensi dalam proses pengorganisasian fase pemilu.
3. Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam masyarakat secara keseluruhan.
4. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Surbakti and Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*.

<sup>18</sup> Ahmad Saufi, Ahmad Faiz, and Muhammad Rezky Yanuar, "Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daering Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19," *Journal Of Character Education Society* 3, no. 3 (2020): 487, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/2400/pdf>.

<sup>19</sup> Bawaslu Ponorogo, "3 Alasan Kenapa Harus Ada Pengawasan Partisipatif," [ponorogo.bawaslu.go.id](https://ponorogo.bawaslu.go.id), 2020, <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/05/15/3-alasan-kenapa-harus-ada-pengawasan-partisipatif/#:~:text=Lebih lanjut dirinya memaparkan 3 %28tiga%29 alasan kenapa,proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu.>

<sup>20</sup> Miftahul Rizka, "Pengawasan Partisipatif," *Kompasiana.com*, 2022, <https://www.kompasiana.com/miftahul34761/628f82a153e2c30aa909f612/pengawasan-pastisipatif>.

Aspek lain yang tentunya menjanjikan terciptanya derajat demokrasi yang lebih baik melalui pemantauan partisipatif adalah terciptanya pola hubungan yang lebih kuat antara wakil dan wakil setelah pemilu. Tanggung jawab perwakilan tentu saja dapat diwujudkan dengan memperjuangkan kepentingan dan memecahkan masalah dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam kebijakan. Delegasi juga dapat memimpin solusi melalui institusi yang secara langsung relevan dengan masalah yang dihadapi publik sebagai perwakilan.

Melalui pengawasan partisipatif, para delegasi dipastikan menjadi lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di daerah mereka masing-masing, lebih banyak mendengarkan, mengartikulasikan, dan menggabungkan kepentingan para delegasi yang mereka wakili. Dalam politik, ketika seorang wakil memberikan hadiah untuk mewakili mereka lagi dalam pemilihan berikutnya, wakil tersebut dikatakan sebagai penanggung jawab.

Pelaksanaan partisipasi sosial dalam pengawasan pemilu sekurang-kurangnya memuat beberapa tujuan pokok, antara lain:

- 1) Mewujudkan pemilu yang demokratis.
- 2) Mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pemilu.
- 3) Menghormati dan meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap hak-hak sipil dan politiknya<sup>21</sup>.

Partisipasi publik dalam pemantauan pemilu serentak memang perlu dan wajib. Pemantauan partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dari fungsi pengendalian pemilu yang sinkron. Secara umum kualitas pemilu yang baik dapat diukur dengan lima indikator, yaitu:

1. Penyelenggara merumuskan dan menegakkan aturan atau aturan pertandingan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan di setiap tahapan. Pemilihan dilakukan serentak.
2. Partisipasi pemilih tinggi, pilihan berdasarkan kesadaran diri dan kejujuran, rasa tanggung jawab, dan tidak ada paksaan.
3. Calon secara demokratis memilih calon potensial tanpa menggunakan politik uang di semua tahapan pemilu.
4. Memilih anggota legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi dan kualitas yang kuat.

---

<sup>21</sup> Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, ed. Sidik Pramono and Retno Widyastutti (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015).

5. Pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahannya, mulai dari pemerintah pusat hingga akar rumput, bersifat netral dan mandiri.

Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawasi pemilu yang demokratis, yang dapat dicapai dengan:

1. Lembaga pemantau pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat yang terlibat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus tetap independen dan tidak memihak (*imparsial*) terhadap salah satu calon/partai peserta pemilu agar tidak mendiskriminasi siapapun;
2. Bawaslu melakukan kampanye sosialisasi secara masif untuk menyadarkan masyarakat akan kewajibannya menuntut hak pilihnya dalam pemilu dengan ikut memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pemantauan pemilu agar dapat ikut memantau semua tahapan penyelenggaraan pemilu, tidak hanya pada hari pemungutan suara;
3. Bawaslu dan partai-partai yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Terpadu) memiliki pandangan yang sama tentang jenis-jenis penyimpangan pemilu dan mekanisme penindakannya;
4. Partai politik juga harus memberi kuasa kepada saksinya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memantau proses penghitungan ulang agar tidak terjadi kesalahan penghitungan, seperti kesalahan pencatatan suara pada Formulir C1;
5. Partai politik juga aktif mengingatkan kader untuk menggunakan hak politiknya secara adil dan jujur;
6. Sinergi antara Bawaslu dengan Komisi Hak Pilih Universal dan pihak terkait dalam hal pengawasan seperti kampanye dan penertiban alat peraga kampanye.

Dengan adanya Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat berperan aktif dalam memantau pemilu, akan meningkatkan kesadaran para pelaku politik, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga diri dan menjunjung tinggi martabat partai politik agar dapat bertindak sesuai dengan haknya masing-masing, pada akhirnya akan mengarah pada pemilu yang demokratis. Mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu dengan partisipasi seluruh

pemangku kepentingan dengan harapan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dalam proses maupun hasil<sup>22</sup>.

#### 4. Hubungan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam Politik

Gerakan Pemuda Ansor atau biasa dikenal dengan GP Ansor adalah salah satu Organisasi Otonom (BANOM) Nahdlatul Ulama' (NU), sebuah organisasi sosial yang berwewasan kepemudaan dan agama<sup>23</sup>. Lahirnya GP Ansor diawali dari mulai muncul dan berkembangnya organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Dimulai pada tahun 1916 muncul organisasi pemuda Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mas Mansyur, H. Abdul Kahar dan Soeyoto Suto, organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan pembentukan mubaligh<sup>24</sup>.

GP Ansor berawal dari sebuah organisasi kepemudaan bernama Nahdlatusy Syubban, berdiri pada tahun 1930 sebagai hasil peleburan dari tiga organisasi kepemudaan yang sudah ada sebelumnya, Syubbanul Wathon, Ahlul Wathon dan Da'watusy Syubban. Lahir dari situasi krisis kolonialisme Belanda, ketiga organisasi ini memiliki misi yang sama yaitu bekerja mengorganisir kaum muda, memperbaharui kecintaan mereka pada tanah air dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka akan pentingnya lepas dari penjajahan. Ketiganya menyanyikan lagu patriotik (Mars) yang sama, Ya Lal Wathon atau Syubbanul Wathon, sebuah lagu berbahasa Arab tentang nasionalisme dan pentingnya melawan penjajahan<sup>25</sup>.

GP Ansor lahir dari tuntutan situasi “konflik” internal dan kebutuhan alamiah oleh tokoh-tokoh sentral NU. Berawal dari perbedaan tokoh tradisional dan modernis yang muncul dalam organisasi Nahdlatul Watan, sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan dakwah dan

---

<sup>22</sup> Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 26, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

<sup>23</sup> Ahmad Subakir and Ahmad Khoirul Mustamir, “Gerakan Moderasi Islam Dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri,” *Www.Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Tribakti Permanent* 31, no. 2 (2020): 188.

<sup>24</sup> Muhammad Ainun Najib, “Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Deradikalisasi Keagamaan Di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,” *Tesis* (Surabaya, 2018), 32–33.

<sup>25</sup> Abdillah Halim, “Politik & Gerakan Kebangsaan Pemuda Muslim (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran Hingga Masa Demokrasi Parlementer),” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 50.

pembinaan kader. K.H. Abdul Wahab Chasbullah, tokoh adat dan K.H. Mas Mansur yang berhaluan modernis akhirnya mengambil gerakan yang berbeda, justru di saat semangatnya untuk mendirikan Organisasi Pemuda Islam semakin tinggi. Dua tahun setelah perpecahan, tahun 1924 Abdul Wahab yang mendukung K.H. dan kemudian menjadi pendiri NU, membentuk kelompok bernama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya terjadi perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU) dan Ansor Nahdlatol Oelama (ANO).

Pada Mukhtar NU IX, Ansor Nahdlatol Oelama (ANO) yang kemudian menjadi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diterima dan disetujui menjadi bagian dari Departemen Kepemudaan NU, dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri, wakil ketua; Abdullah Ubaid, H. Achmad Barawi dan Abdus Salam sebagai Sekretaris. Oleh karena itu, keberadaan GP Ansor tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian integral dari NU sebagai salah satu Badan Otonom (Banom) yang bertugas untuk mengorganisir kepemudaan NU. Bagian NU ini pada 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934 kemudian ditetapkan sebagai lahirnya gerakan pemuda Ansor<sup>26</sup>.

Sepanjang sejarah pembangunan negara, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut, GP Ansor telah memainkan peran strategis yang penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensinya, mampu mendorong dan mengakselerasi mobilitas sosial, politik dan budaya anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran dan kualitas keanggotaannya. GP Ansor terus eksis dalam setiap episode sejarah bangsa dan terus menempati posisi dan peran strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan bangsa.

Salah satu wadah diskusi pemuda NU seperti GP Ansor adalah Tashwirul Afkar. Tashwirul Afkar adalah kelompok diskusi yang didirikan oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah sepulangnya dari Mekkah pada tahun 1914. Kantor pusatnya berada di Surabaya.

Kiai dan Kiai muda menjadi anggota kelompok. K.H. Ahmad Daran Kebondalem menjabat sebagai ketua acara. Choirul Anam menyatakan dalam bukunya Perkembangan dan

---

<sup>26</sup> Zudi Setiawan, "Sejarah Lahirnya Gerakan Pemuda Ansor Pada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama," *Spektrum* 19, no. 2 (2022): 7–11 <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6657>.

Pertumbuhan Nahdlatul Ulama bahwa Madrasah Tashwirul Afkar masih beroperasi, tetapi di pinggir kota Surabaya. Dunia yang beradab harus bersaing dengan mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah, seperti halnya kolonialisme yang membuat orang lebih miskin dan kurang berkembang.

Tashwirul Afkar menyediakan forum di mana para kiai muda dari seluruh negeri dapat melakukan percakapan bermakna yang akan mendorong mereka untuk tumbuh sebagai pemimpin dan memosisikan mereka lebih baik untuk berkontribusi pada pergerakan nasional. Tentu saja, K.H. Abdul Wahab Hasbullah tidak bisa menghentikan serangan aliran sesat anti-Islam sendirian. Untuk lebih membekali kiai muda untuk mempertahankan sekolah Ahlussunnah wal Jama'ah, Tashwirul Afkar memperluas operasinya di luar pembicaraan dan pendirian madrasah pada tahun 1924 dengan menawarkan kelas-kelas tentang topik Islam.

Madrasah Nahdlatul Watan yang dikelola oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan rekan-rekannya menjadi focal point dalam acara yang berlangsung tiga kali seminggu ini. Jawa Timur bukan satu-satunya bagian pulau yang ambil bagian; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Madura juga terwakili. Total ada 65 mahasiswa yang mengikuti program ini. K.H. Abdul Wahab Hasbullah meminta bantuan sahabatnya K.H. Bisri Syansuri, K.H. Mas Alwi, K.H. Abdul Halim Leuwimunding Majalengka, K.H. Ridwan Abdullah dari Surabaya, K.H. Maksun Lasem, dan K.H. Khalil Lasham karena banyaknya peserta.

Para pemuda mendapat bantuan dari warga Surabaya Abdullah Ubaid, Thahir Bakri, Abdul Hakim Petukangan, serta Hasan dan Nawawi. K.H. Abdul Wahab Hasbullah telah mempersiapkan pembelaan yang kuat bagi para kiai muda di daerah-daerah dengan mengadakan kursus-kursus ini, membekali mereka dengan alat-alat yang mereka butuhkan untuk menghadapi dan melayani secara langsung debat yang dimulai oleh Ahlussunnah wal Jama'ah yang anti dan merenungkan nasib bangsa karena terungkap koloni.

Meski demikian, K.H. Abdul Wahab Hasbullah tetap tidak yakin bahwa upaya tersebut mampu mengkonsolidasikan umat Islam secara besar-besaran dan melibatkan mereka dalam pergerakan nasional. Untuk itu, ia meminta restu Hadratusy Syekh Hasim Asy'ari agar diperbolehkan mendirikan jam'iyah. Baru pada

tahun 1926 jam'iyah ini akhirnya berdiri dengan nama Nahdlatul Ulama<sup>27</sup>.

Kiprah GP Ansor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dipungkiri. GP Ansor memang lahir untuk menjadi wadah aksi dan pengabdian yang konkrit terhadap agama, bangsa, ulama, pondok pesantren dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah. Hal inilah yang membedakan GP Ansor dengan organisasi kepemudaan lainnya. Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. GP Ansor bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan dan membina generasi muda Indonesia menjadi kader negara yang kuat, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkepribadian mulia, berakhlak mulia, sehat, terampil, membatu, ikhlas dan berbuat baik perbuatan.
- b. Menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah dengan menerima manhaj, salah satu dari empat madzhab dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berperan aktif dan penting dalam pembangunan negara untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil, makmur, manusiawi dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

Dalam analisis Machrus Irsyam (1981) yang dikutip oleh Sabat Banuaji, Wiwik Widayati, & Puji Astuti, GP Ansor memiliki tiga pilar utama kekuatan politik, termasuk NU dalam hal ini, antara lain: *pertama*, basis massa (struktur sosial) pesantren pedesaan. *Kedua*, basis politisi ulama digambarkan memiliki koherensi gerakan karena beroperasinya dua struktur yang saling melengkapi, yaitu struktur formal yang terorganisir dan struktur informal yang muncul dari interaksi antara ulama, politisi dan massa model hubungan negarawan dijunjung tinggi<sup>28</sup>.

Melaksanakan pendidikan politik di organisasi kepemudaan seperti GP Ansor merupakan salah satu cara yang harus dilakukan dalam dinamika politik Indonesia, khususnya bagi generasi muda, untuk mempersiapkan masa depan politik Indonesia.

---

<sup>27</sup> Ansor purworejo, "Tashwirul Afkar, Kelompok Diskusi Pemuda NU," [ansorpurworejo.org](https://ansorpurworejo.org), 2020, <https://ansorpurworejo.org/tashwirul-afkar-kelompok-diskusi-pemuda-nu/>.

<sup>28</sup> Sabat Banuaji, Wiwik Widayati, and Puji Astuti, "Peran Gerakan Pemuda Ansor Dalam Penguatan Civil Society Di Kabupaten Jepara" 2, no. 4 (2013): 101–102.

Menurut Windari (2013) yang dikutip oleh Aris Sanusi & Cecep Darmawan, Semangat juang yang tinggi merupakan potensi pemuda. Maka dengan hadirnya organisasi kepemudaan, sikap positif ini akan mendorong kegiatan positif sehingga nantinya dapat melahirkan generasi penerus pemimpin bangsa yang menduduki jabatan tinggi menggantikan pemimpin lama atau senior.

Hal ini menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam membentuk dan mengembangkan potensi generasi muda, terutama melalui pendidikan politik untuk memahami politik generasi muda. Juga, berkaca pada realita bahwa isu-isu yang mendera generasi muda sedang berlangsung membuat bumerang nasional Indonesia. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu membentuk karakter Pancasila bagi generasi muda<sup>29</sup>.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan rujuk, dan juga menghindari kemiripan dengan penelitian ini, kemudian untuk menemukan kebaruan penelitian ini dan dukungan serta ulasan seperti yang dinyatakan lebih lanjut di atas, penulis usahakan untuk meninjau terlebih dahulu sumber data perpustakaan yang ada, seperti buku dan jurnal. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasilnya penelitian terdahulu yaitu antara lain:

Jurnal penelitian Aris Riswandi Sanusi & Fitri Silvia Sofyan pada tahun 2020, berjudul “*Implementasi Pendidikan Politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karawang Dalam Menumbuhkan Pemahaman Nasionalisme Generasi Muda Nahdlatul Ulama*”. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan pendidikan politik GP Ansor kabupaten Karawang mengenai nasionalisme yang kegiatannya

---

<sup>29</sup> Aris Riswandi Sanusi and Cecep Darmawan, “Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)” 25, no. 1 (2016): 25.

meliputi pelatihan kader dasar dan pengembangan kader yang penyelenggaraannya melalui program pengembangan kader yang dilakukan dalam bentuk diskusi, pelatihan pengembangan profesi, Pendidikan bela negara, dan pelatihan ekonomi Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Jurnal penelitian Aris Riswandi Sanusi & Cecep Darmawan pada tahun 2016, yang berjudul "*Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif Terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat)*". Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tulisan ini berisi tentang Pendidikan politik dalam pandangan GP Ansor Jawa Barat yang berupaya untuk membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda NU. Pendidikan politik yang diselenggarakan GP Ansor Jawa Barat antara lain: pendidikan dan pelatihan kader, pengembangan kader, promosi dan pendistribusian kader. Pendidikan dan pelatihan kader yang diselenggarakan PW GP Ansor Jawa Barat meliputi PKD dan PKL dengan materi pokok ke-NU-an, ke-Indonesiaan dan kebangsaan, manajemen organisasi, dan kepemimpinan.

Jurnal penelitian Abdillah Halim pada tahun 2021, yang berjudul "*Politik & Gerakan Kebangsaan Pemuda Muslim (Studi Terhadap Kiprah GP Ansor Pada Masa Kelahiran hingga Masa Demokrasi Parlementer)*". Penelitian ini membahas mengenai Gerakan Pemuda Ansor yang konsisten dengan politik dan gerakan kebangsaan ini sejak masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer, dan juga hingga masa sekarang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi gerakan dan politik NU sebagai mentor Gerakan Pemuda Ansor, yang bercorak kebangsaan, kemasyarakatan, dan keagamaan sekaligus.

Jurnal penelitian Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin pada tahun 2018, yang berjudul "*Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya

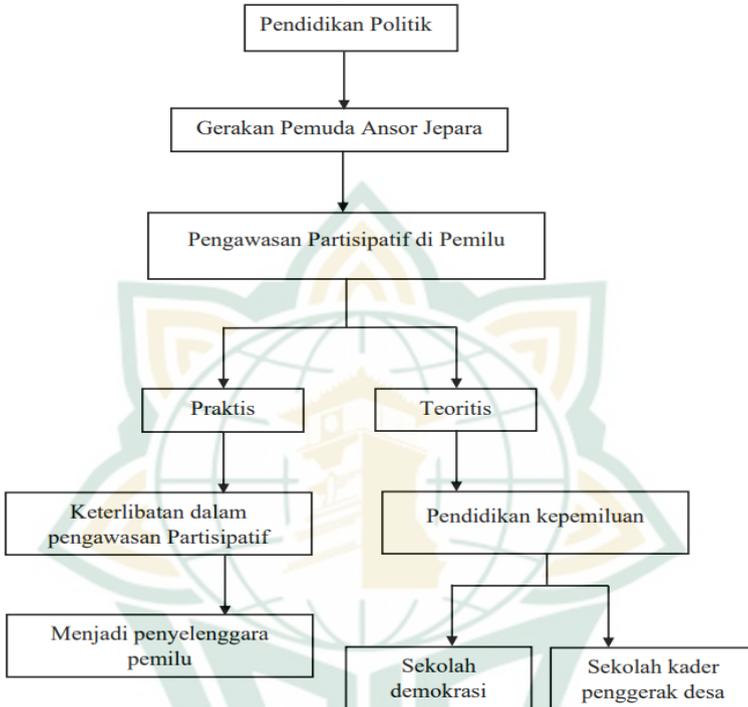
sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis.

Jurnal penelitian Nu'man Nugroho, Benediktus Dalupe, M.IP., Restu Rahmawati, S.IP., MA. Samsul Ode, S.IP., M.Si, yang berjudul "*Implementasi Pendidikan Politik Bagi Pemuda (Studi Kasus Program Nasional Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Wilayah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020)*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang implementasi program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang dilakukan di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara. Program dari Bawaslu RI ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi pemuda. SKPP diharapkan dapat meningkatkan integritas pemilu, dengan meningkatnya pengawasan partisipatif pemilih terutama kalangan pemuda.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir sebagai model konseptual mengenai bagaimana hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang sudah diartikan sebagai masalah yang penting. Guna memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Kerangka berpikir diatas untuk menjelaskan bahwa Gerakan Pemuda Ansor Jepara melaksanakan pendidikan politik yaitu dalam pengawasan partisipatif di pemilu 2024. Gerakan pemuda Ansor Jepara melaksanakan pendidikan politik terhadap kader mengenai pengawasan partisipatif di pemilu yang secara praktisnya keterlibatan dalam pengawasan partisipatif kader menjadi penyelenggara pemiludan secara teoritisnya pendidikan kepemiluan antara lain, sekolah demokrasi dan sekolah kader penggerak desa.